

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENENGGELAMAN KAPAL DALAM UPAYA
PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DI
BIDANG PERIKANAN OLEH PENYIDIK TENTARA NASIONAL
INDONESIA ANGKATAN LAUT**

(Studi di Wilayah Hukum Pangkalan Utama TNI AL 1 A Belawan)

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Andalas**

Disusun Oleh:

HASNUL TRI SYURA

1410112090

Pembimbing 1 : Yoserwan,S.H.,M.H.,LLM

Pembimbing 2: Iwan Kurniawan,S.H.,M.H.


Program Kekhususan: Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2018

	No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa: HASNUL TRI SYURA	No. Alumni Fakultas:
	a) Tempat, Tanggal Lahir: Binjai, 16 Juni 1996 b) Nama Orang tua: Alm Suyatno dan Hj Elly Supina c) Fakultas: Hukum d) Program Khusus: Hukum Pidana e) No Bp: 1410112090	f) Tanggal Lulus: 24 Juli 2018 g) Predikat Lulus: Dengan Pujian h) Lama Studi: 4 Tahun 0 Bulan i) IPK : 3,55 j) Alamat: Jalan Marelan I Pasar IV Barat No 093 Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan	
PELAKSANAAN PENENGGALAMAN KAPAL DALAM UPAYA PENEGGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN OLEH PENYIDIK TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT (Studi di Wilayah Hukum Pangkalan Utama TNI AL 1 A Belawan) (Hasnul Tri Syura, 1410112090, Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 79 Halaman, 2018)			
ABSTRAK			
<p>Indonesia memiliki potensi kekayaan laut yang berlimpah dengan produksi perikanan tangkap yang mencapai 6.351.480 Ton/Tahun. Namun pengelolaan belum maksimal sehingga banyak terjadi tindak pidana dibidang perikanan, dengan pemerintah melalui Menteri Kelautan dan Perikanan menginstruksikan untuk melakukan penenggalaman/pemusnahan kapal dengan mengacu pada Pasal 69 Ayat (4) UU Perikanan. Untuk itu permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan pemusnahan/penenggalaman kapal dimiliki oleh pelaku dalam tindak pidana di bidang perikanan? (2) Bagaimana bentuk koordinasi penyidik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dengan penyidik PNS Perikanan dan penyidik Polri terkait tindak pidana di bidang perikanan? (3) Apa kendala penyidik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam melakukan penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana di bidang perikanan? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis sosiologis dengan penelitian deskriptif analitis. Adapun hasil penelitian mengenai Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana di Bidang Perikanan oleh Penyidik Tentara Nasional Indonesia Angkatan laut bahwa dalam penenggalaman/pemusnahan kapal dalam tiga tahap yakni (a) Penenggalaman/pemusnahan kapal oleh kapal pengawas perikanan mengacu pada Pasal 69 Ayat (4) UU Perikanan dimana penenggalaman/pemusnahan kapal harus memenuhi syarat subjektif maupun objektif (b) dalam tahap penyidikan penenggalaman/pemusnahan kapal harus mendapatkan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat (c) berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam pelaksanaan penenggalaman kapal pada tahap penyidikan dan putusan pengadilan dengan cara memasang peledak di badan kapal dan dibawa ke lokasi penenggalaman, kemudian rombongan menuju ke lokasi penenggalaman. Dengan banyak instansi penegakan hukum pelaku tindak pidana di bidang perikanan dibentuklah form Koordinasi di tingkat Pusat maupun daerah, untuk Forum Koordinasi di tingkat Daerah mengacu pada Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/543/KPTS/2016 Tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan Provinsi Sumatera Utara. Kendala kendala yang dihadapi oleh Penyidik TNI AL adalah kendala yang bersifat non teknis yakni (a) kurangnya sarana dan prasarana. (b) kurangnya Dana Alokasi Khusus dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan</p>			
Kata Kunci : Tindak Pidana di Bidang Perikanan, Penegakkan Hukum, TNI AL			

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 14 Mei 2018

Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji.

Tanda Tangan		
Nama Terang	Dr. A. Irzal Rias, S.H., M.H.	Nelwits, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana : Dr. A. Irzal Rias, S.H., M.H.


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda
	Tangan:	
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda
	Tangan:	